

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Muhammad Ridho¹, Susiani², Suwandi³, Hariyadi⁴, Yeni Frendiana⁵

¹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba. Email: gajipaspan@gmail.com

²Dinas Pendidikan Kab. OKI. Email: susian1971@gmail.com

³Dit Lantas Polda Sumsel. Email: suwandieza@gmail.com

⁴UPTB Samsat Wilayah Ogan Ilir Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
Email: hariyadiscorpio@gmail.com

⁵BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Email: yenifrendiana@gmail.com

ABSTRACT

The background of the research with the title "Strategy for Development of Government Apparatus Resources in the Regional Public Service Agency (BLUD) of South Sumatra Province", so far the South Sumatra Province BPSDMD in carrying out education and training for the State Civil Apparatus is only supported by APBD funds, so the volume of education and training is very large. limited. In the midst of the minimal budget allocation for the implementation of education and training in 2016 and 2017 budget efficiency. so that some of the planned activities could not be carried out, even in 2018 there was absolutely no allocation of funds for the training of the State Civil Apparatus in South Sumatra Province. The implementation of PPK-BLUD is effective since it was stipulated by Governor Decree Number 201/KPTS/BPKAD/2017 dated March 17, 2017 with Full BLUD status. The purpose of the application of the PPK-BLUD is to implement the Financial Management Pattern of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD) at the Regional Human Resources Development Agency of South Sumatra Province. As well as the Implementation of the Financial Management Pattern of Regional Public Service Agencies (PPK-BLUD) to increase the volume of performance of the Regional Human Resources Development Agency of South Sumatra Province. As well as making efforts or steps that need to be taken/recommended in an effort to improve and develop the Implementation of the Financial Management Pattern of Service Agencies Regional General Affairs (PPK-BLUD). The result of this research is that the implementation of PPK BLUD has been running in accordance with the applicable rules. so that the existing systematics must be consistent and clear (to be implemented or executed), because if the orders given change frequently, it can cause confusion for the implementers in the field. The implementation of PPK-BLUD has encouraged the improvement of service performance for BPSDMD of South Sumatra Province, namely the implementation of Tk II, Level III and Level IV Leadership Training, Basic Training Education and Training, Principal Training and Education and Training for Principal Strengthening. 2017Rp. 7,851,340,000 with the realization of 7,908,549,874 means that the target is achieved 100.73%. 2018 is the second year of the implementation of KDP-BLUD at the BPSDMD of South Sumatra Province, with a revenue target of Rp. 12,271,744,000 with a realization of Rp. 12,764,116.446,- While the revenue target for the 2019 implementation of the PPK-BLUD is Rp. 14,867,404,000 with a realization of Rp. 14,320,1442,500 as of December 27, 2019.. With the ease/flexibility of implementing PPK-BLUD not only pursuing remuneration, flexibility, avoiding laws and regulations in the procurement of goods/services, the application of PPK-BLUD is to improve the quality of public services, financial performance, and performance benefits for the community in a sustainable manner that is managed based on sound business practices.

Keywords: HR Development Strategy, Regional Public Service Agency (BLUD)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian dengan judul "Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Sumatera Selatan", Selama ini BPSDMD Provinsi Sumsel dalam

melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara hanya didukung oleh dana APBD, sehingga volume penyelenggaraan kediklatan sangat terbatas. Ditengah minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 dan tahun 2017 efisiensi anggaran. sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan PPK- BLUD berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Tujuan dari Penerapan PPK- BLUD adalah untuk Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Serta Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) peningkatan volume kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.serta melakukan upaya atau langkah-langkah yang perlu diambil/direkomendasikan dalam upaya peningkatan dan pengembangan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dalam penerapan PPK BLUD sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku . sehingga sistematika yang telah ada haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan), karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Penerapan PPK- BLUD telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan bagi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tk II, Tingkat III dan Tingkat IV, Diklat Pelatihan Dasar, Diklat Kepala Sekolah dan Diklat Penguatan kepala Sekolah .Sejak dilaksanakannya PPK-BLUD realisasi jasa layanan tahun 2017Rp. 7.851.340.000 dengan realisasi 7.908.549.874 artinya target tercapai 100,73 %. Tahun 2018 merupakan tahun kedua penerapan PPK-BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan target pendapatan sebesar Rp. 12.271.744.000 dengan realisasi Rp. 12.764.116.446,- Sedangkan target pendapatan tahun 2019 penerapan PPK-BLUD adalah sebesar Rp. 14.867.404.000 dengan realisasi Rp. 14.320.1442.500 per 27 Desember 2019.. Dengan kemudahan/fleksibilitas penerapan PPK- BLUD tidak hanya sekedar mengejar remunerasi, fleksibilitas, menghindari peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa, penerapan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan yang dikelola berdasarkan praktik bisnis yang sehat.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan SDM, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara keseluruhan Proyeksi pendapatan BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berasal dari Layanan Kediklatan dan Layanan non kediklatan Tahun 2017 s/d 2021 pengaruh implementasinya sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari proyeksi pendapatan BLUD BPSDMD 2017- 2021 serta proyeksi anggaran pendapatan dan belanja BLUD BPSDMD 2017 - 2021. Dapat dilihat padatable sebagai berikut:

Tabel 1
PROYEKSI PENDAPATAN BLUD
BPSDMD 2017 – 2021

No	Tahun	Proyeksi Pendapatan	Persentase Peningkatan	Proyeksi Diklat
1	2017	7.851.340.000,-	-	Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep
2	2018	8.182.082.000,-	4%	Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep

3	2019	10.971.402.000,-	34%	Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep
4	2020	11.709.635.000,-	7%	Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep
5	2021	13.657.970.000,-	17%	Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep

Sumber : Sub Bag Perencanaan BPSDMD Prov. Sumsel

Sebagaimana dimaklumi bahwa Pemimpin di Provinsi Sumatera Selatan telah banyak melakukan yang terbaik namun bagaimanapun kondisi ekonomi pemerintah daerah saat ini sangat sulit untuk mengerakkan secara serentak visi dan misi pemerintah daerah. Karena itu perlu pemikiran dan kajian atas kebijakan yang ada baik perencanaan maupun menyangkut keuangan.

Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah perubahan terhadap

pola penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan penganggaran berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output, pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dimana organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*).

Kebijakan Kebijakan ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, yang disebut dengan Badan Layanan Umum. Demikian pula halnya di lingkungan pemerintah daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berpotensi untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dimana hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang menjadi dasar dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) saat ini.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara. Pendidikan dan pelatihan ini terdiri dari pendidikan dan

pelatihan pelatihan Laaksar (sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil), pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, yang meliputi Diklat Managerial (Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III, dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II) serta pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan fungsional. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dimaksud merupakan salah unsur yang sangat penting dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kualitas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini penyelenggaraan pendidikan pelatihan, hanya mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ataupun bantuan Pemerintah dalam bentuk dana dekonsentrasi sebagai satu satunya sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatannya. Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan merumuskan sebuah judul “Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Sumatera Selatan “

Perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang disebutkan di atas maka dalam penulisan ini rumusan masalah yang diangkat adalah “Bagaimanakah Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Provinsi Sumatera Selatan “

KERANGKA TEORI

Konsep-konsep Strategi

Menurut Jatmiko (2003: 4), Strategi dipahami sebagai suatu cara organisasi untuk mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal

organisasi. Strategi yang dibuat harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah sehingga strategi menjadi fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang memiliki peranan yang penting dalam menentukan kebijakan.

Strategi SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Penekanan lainnya sehubungan dengan manajemen sumber daya manusia, dikemukakan Notoatmodjo(1998: 108) sebagai berikut :

Manajemen sumber daya manusia pada hakekatnya adalah penerapan manajemen tersebut khusus untuk sumber daya manusia, sehingga dapat didefinisikan : manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia(Zamzam & Aravik, 2017). Pendidikan dan pelatihan menurut Notoatmodjo (1998:25) dibedakan menjadi sebagai berikut :

Pendidikan (formal) didalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan (*training*) merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang.

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada organisasi perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

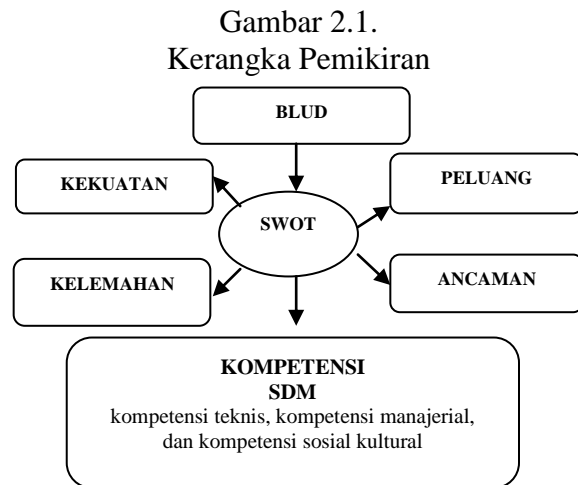
Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*)menurut Wheelen dan Hunger (2012: 16) merupakan sebuah langkah untuk dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal berisi variabel peluang dan ancaman (*opportunities and threats*) yang berada di luar organisasi dan bukan merupakan hal yang dapat dikontrol oleh pimpinan organisasi dalam jangka waktu dekat.

Lingkungan internal organisasi terdiri dari variabel kekuatan dan kelemahan (*strengths and weaknesses*) yang berada dalam tubuh organisasi itu sendiri dan biasanya tidak dalam kontrol pimpinan organisasi dalam waktu dekat. Yang

termasuk dalam variabel ini adalah struktur, budaya, dan sumber daya organisasi.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka pikir yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini adalah:



Teori dari Fred R. David (2011: 179)

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dilihat dari fenomena masalah yang ingin dikaji dengan melihat tingkat ekspalasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) mengemukakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita

Objek dalam penelitian ini adalah Strategi Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang berperan dalam memberikan data dan informasi dalam lingkup penelitian dan sarana yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan (Firdaus & Zamzam, 2018). Data primer diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian seperti Kinerja Pegawai Pada Bagian Umum dan Perlengkapan, Bidang Perencanaan, Sekretaris, ka BPSDMD dan Keuangan, Kabid Kabid penyelenggara Diklat Kepemimpinan, Tehnis dan Fungsional, Data primer di peroleh dari informan melalui penelitian lapangan yang diharapkan informan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan, arsip, dokumen-dokumen serta data dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta sifatnya mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berupa surat keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan Strategi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Di Provinsi Sumatera Selatan, serta data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Teknik Pengambilan Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi informan

harus memiliki banyak pengalaman tentang masalah penelitian dan secara sukarela menjadi sumber informasi meskipun tidak secara formal, mereka dapat memberikan pandangannya. Adapun informan adalah sebagai berikut :

1. Implementor : Kepala Badan BPSDMD Provinsi Sumsel, Bagian Perencanaan, Kepala Keuangan Kepada BPSDMD Kabupaten/Kota
2. Kelompok Sasaran: Kepada BPSDMD Kabupaten/Kota

Uji Validitas Data/Keakuratan Data

Sebuah penelitian studi kasus, menurut Winston (1997), adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan strategi *Triangulasi*. Strategi *Triangulasi* diperlukan untuk memastikan bahwa proses penelitian dari studi kasus yang dilakukan sudah sesuai atau valid. Validitas proses penelitian dari studi kasus menjadi penting untuk menghindari hasil penelitian yang diragukan reliabilitasnya atau subjektifitas peneliti yang berlebihan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Tempat Penelitian

Keadaan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

- a. PNS
- b. Tenaga Honoror

Total : 103 orang

Dari 100PNS dapat diuraikan sesuai masing-masing formasi sebagai berikut :

Tabel 4.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	8	8 %
2	S2	44	44 %
3	S1	31	31 %

4	D3	2	2 %
5	SMA	15	15 %
Jumlah		100	100

Tabel 4.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	59	59 %
2	Perempuan	41	41 %
Jumlah		100	100

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana untuk menunjang kegiatan Kediklatan pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel berikut :

Tabel 4.3.

Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

No	Sarana dan Prasarana	Gedung/Ruangan		Kapasitas Keseluruhan
		Jumlah	Fasilitas	
1	Gedung Administrasi	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsys tem, Meubelair	-
2	Gedung Widyaiswara dan Perpustakaan	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsys tem, Meubelair	-
3	a. Aula Putri Kembar Dadar	1 Unit	AC, Sound System Lengkap	200 Kursi
		1 Unit	SDA	80 kursi
4	Ruang Belajar	7 kelas	7 Ruang AC	280 orang
5	Laboratorium bahasa dan Lab. Komputer	2 kelas	AC, Sound Sistem, Proyektor	80 orang
6	Asrama/Penginapan	71 Kamar	AC/kipas angin	211 orang
	a. Asrama Putri Rambut Selako	10 kamar	2 orang per kamar	20 orang
	b. Asrama Mayang Sari	15 kamar	5 orang per kamar	75 orang
	c. Asrama Bagus	12 Kamar	3 orang per	36 orang

	Kuning		kamar	
d.	Asrama Batuapi	11 kamar	3 orang per kamar	33 orang
e.	Asrama Dapuntah yang	12 kamar	2 orang per kamar	24 orang
f.	Asrama Tuan Junjungan	11 kamar	6 kamar kapasitas @3 orang, 5 kamar @1 orang/kamar	23 orang
7	Paviliun/Mess	1 Unit	6 Kamar AC	12 orang
8	Ruang Makan	4 Unit	Meja dan Kursi	280 Orang
9	Klinik / Balai Pengobatan	1 Unit	Type 36 2 Orang T.Medis 2 Mobil Ambulan	2 Kamar Tidur
10	Masjid	1 Unit	1 Unit	300 Orang
11	Rumah Dinas	2 Unit	2 Unit	Type 36 dan 54
12	Gedung Koperasi	1 Unit	Waserba/ Kantin	20
13	Ruang Perpustakaan	1 Unit	24 Meja dan Kursi	24
14	Lap.Tenis	1 Unit	2 band	-
15	Lapangan Badminton	1 unit	1 Band	-
16	Tennis Meja	2 Unit	2 Meja	-
17	Kendaraan Dinas : Roda 2 Roda 4	7 Unit 9 Unit		Minibus 6 Unit Ambulan 2 Unit Pick Up 1 Unit

	Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) saat ini. 4) Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara 5) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) pada organisasi perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang secara operasional memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa seorang ASN paling tidak mengikuti pendidikan pelatihan 25 jam pelajaran dalam satu tahun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seorang PNS paling tidak harus memiliki 3 kompetensi yakni, kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural,	dan tahun 2017 yang mengalami beberapa kali efisiensi sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara. 4) Kondisi sarana dan prasarana masih belum maksimal 5) Pengelolaan BLUD dan pola pikir penyenggara belum berbasis bisnis 6) Pelayanan publik penyelenggara masih lemah
--	--	---

O		
Peluang(O) 1) BLUD penerapan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan dari hasil kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan, instansi vertikal Kemenhum HAM, Kemenrisdik ti, Mahkamah Agung . 2) Merupakan satu satunya di Indonesia yang melaksanakan PPK- BLUD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan 3) BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan	Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUDPenuh. Guna Meningkatkan potensi pemasangan dana untuk pengembangan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.	APBD Provinsi Sumsel mengalami beberapa kali efisiensi sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun 2018 sama sekali tidak ada alokasi dana untuk pelatihan Aparatur Sipil Negara oleh karena itu oleh karena itu penerapan PPK- BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan berupa jasa layanan yang merupakan satu satunya di Indonesia yang melaksanakan PPK-BLUD

Hasil Uji Analisis SWOT

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel SWOT sebagai berikut:

	S	W
INTERNAL	<p>Kekuatan(S)</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah perubahan terhadap pola penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja.</p> <p>2) Penerapan PPK- BLUD berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh.</p> <p>3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang menjadi dasar dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Kelemahan(W)</p> <p>1) Provinsi Sumsel dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara hanya didukung oleh APBD, sehingga prekuensi penyelenggaraan serta jumlah peserta pelatihan yang dapat dijangkau sangat terbatas</p> <p>2) Alokasi Anggaran yang minim merupakan masalah utama yang dihadapi di Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>3) APBD Provinsi Sumsel terutama pada tahun 2016</p>
EKSTERNAL		

<p>berpotensi melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),</p> <p>4) Kebutuhan pegawai akan kualitas dan kompetensi sebagai tuntutan UU nomor 5 tahun 2014</p> <p>Meningkatkan potensi pemasukan dana untuk pengembangan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan</p>		
<p>T</p> <p>Ancaman(T)</p> <p>1) Kinerja penyelenggaraan pengelolaan BLUD sangat menentukan aspek bisnis yang dapat bertahan atau tidak di masa depan.</p> <p>2) Banyaknya Pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya yang belum terakomodir secara maksimal</p> <p>3) Penempatan Pimpinan yang berkomitmen terhadap BLUD</p> <p>4) Target PAD dari BLUD yang belum maksimal</p> <p>5) BLUD belum di isi dengan SDM yang proporsional dan profesional</p>	<p>Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara yang dapat berhasil bila didukung oleh pimpinan yang memiliki pola pikir bisnis.</p>	<p>Pelayanan publik penyelenggara masih lemah sehingga target PAD belum tercapai.</p>

1. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan yang ditandai dengan peningkatan jumlah dan jenis Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Meningkatnya efisiensi dan kinerja anggaran yang ditandai meningkatnya pendapatan berupa jasa layanan dan jumlah pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Meningkatnya kinerja manfaat bagi *stakeholder* yang ditandai meningkatnya pengguna jasa pelayanan pendidikan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Strategi menerapkan PPK-BLUD

Setelah menerapkan PPK-BLUD pengaruh langsung yang dirasakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya volume kegiatan pelatihan dan meningkatnya kinerja keuangan melalui penerimaan jasa pelayanan, dimana tahun 2017 dilaksanakan 12 kegiatan pelatihan dengan jumlah jasa layanan sebesar Rp7.851.340.000 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2018 direncanakan sebanyak 23 kegiatan dengan rencana penerimaan jasa layanan sebesar Rp13.682.082.000,-
- b. Meningkatnya apresiasi lembaga/instansi yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Diksar CPNS Kemenrisdiki sebanyak 4 angkatan tahun 2017, Diksar CPNS MA 2 Angkatan tahun 2018, Diksar CPNS Kemenkumham sebanyak 12 angkatan tahun 2018.
- c. Diberinya kepercayaan oleh LAN RI untuk menyelenggarakan Diklat Pim Tingkat II secara mandiri dalam tahun

Strategi menerapkan PPK-BLUD Kompetensi Manajerial

Implementasi kebijakan PPK BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang mulai dilaksanakan tahun 2017 dapat dikatakan telah berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan ditetapkannya kebijakan PPK-BLUD yaitu sebagai berikut :

2017 ,2018 dan tahun 2019 masing masing 1 angkatan dalam 2 kelas. .

- d. Meningkatnya pemberdayaan Widyaiswara BPSDMD provinsi Sumatera Selatan sebagai pengampu mata pelatihan.
- e. BPSDMD merupakan BPSDMD yang pertama sekali menerapkan PPK BLUD, sehingga menjadi rujukan bagi BPSDMD Provinsi lainnya dalam penerapan PPK-BLUD.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas Implementasi Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerapan PPK-BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan PPK- BLUD telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan bagi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tk II, Tingkat III dan Tingkat IV, Diklat Pelatihan Dasar, Diklat Kepala Sekolah dan Diklat Penguatan kepala Sekolah dengan realisasi jasa layanan tahun 2017 **Rp. 7.851.340.000 dengan realisasi 7.908.549.874 artinya target tercapai 100,73 %**. Tahun 2018 merupakan tahun kedua penerapan PPK-BLUD pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan target pendapatan sebesar Rp. 12.271.744.000 dengan realisasi Rp. 12.764.116.446,- Sedangkan target pendapatan tahun 2019 penerapan PPK-BLUD adalah sebesar Rp. 14.867.404.000 dengan realisasi Rp. 14.320.1442.500 per 27 Desember 2019..
2. Dengan meningkatnya kinerja keuangan dalam arti semakin besar penerimaan jasa layanan semakin besar efisiensi anggaran APBD dapat dihemat atau

dialihkan unuk membiayai belanja modal atau belanja lainnya, bahkan tahun 2018 semua kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan PPK BLUD.

3. Meningkatkan Kinerja Manfaat bagi lembaga dan stakeholder, dalam arti peserta pelatihan sebagai pengguna jasa tidak saja dari Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga diikuti oleh peserta dari luar Provinsi Sumatera Selatan, serta lembaga/kementerian yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, secara paralel pula sekaligus pemberdayaan Widyaiswara sebagai pengampu mata pelatihan.

Rekomendasi

Penerapan PPK-BLUD tidak hanya sekedar mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan semata, tetapi kewenangan penerapan PPK-BLUD diberikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja manfaat, dan kinerja keuangan, dengan tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan kinerja BLUD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, direkomendasikan 3 hal sebagai berikut, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan perubahan pola pikir (*mindset*) semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) terutama bagi pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai, hal ini sebagai upaya peningkatan daya saing BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Perlu peningkatan kapasitas dan profesionalisme Widyaiswara sebagai tenaga pengajar pendidik dan pelatih (Dikjartih) secara berkesinambungan sebagai komponen utama dalam pelaksanaan pelatihan .
4. Perlunya meningkatkan sarana dan parasaram BLUD dalam melaksanakan Pola PPK –BLUD
5. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam meningkatkan target PAD yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James L. John M Ivancevich dan James H. Donnely , 1984 . *Organisasi dan Manajemen : Prilaku, Struktur dan Proses*, terjemahan Djoerban Wahid, Erlangga , Jakarta
- Hoogerwerf, A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*, Alih bahasa L.L. Tobing, Erlangga, Jakarta
- Santoso. 1988. *Analisis Kebijakan Publik*, P.T. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Sugiyono 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung Alfabert
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001, *Pengantar Pemikiran Teori dan Orentasi Pengukuran Sosial*, P.T. Gunung Agung, Jakarta.
- Zamzam, F. & F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2017). *Manajemen SDM Berbasis Syariah*. Bogor: CV. RWTC Success.

Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.